



LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2023

INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PROFESIONALISME



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh



Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai visi dan misi BPK sesuai dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024. Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-

Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Badan Pemeriksa Keuangan menyusun Laporan Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 yang akan mendukung pelaksanaan Renstra BPK 2020-2024. Semoga laporan ini dapat mendukung pengambilan keputusan bagi Pimpinan untuk menentukan arah pengembangan organisasi yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 masih belum sempurna, sehingga masukan dan kritikan membangun akan membantu penyempurnaan laporan ini selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Kepala Perwakilan

Karyadi

NIP 197111291998031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	2
C. Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Jawa Timur	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.....	5
E. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Jawa Timur.....	9
B. Target Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Timur	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Hasil Evaluasi AKIP	12
B. Capaian Kinerja	13
1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (IKU 1) ...	17
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan (IKU 2) ..	20
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (IKU 3).....	24
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional (IKU 4)	28
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan (IKU 5)	32
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal (IKU 6)	34
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK (IKU 7)	37
8. Hasil Evaluasi AKIP (IKU 8)	40
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (IKU 9)	43
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan (IKU 10)	48
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (IKU 11).....	52
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi (IKU 12)	54
13. Tingkat Kinerja Anggaran (IKU 13)	56
C. ANALISIS EFISIENSI	59
D. Budaya Kerja	61
E. Realisasi Anggaran	62
F. Inovasi	63

G. Penghargaan	63
BAB IV PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia di BPK Jatim	5
Tabel 2 Laporan Output Per Desember 2022	6
Tabel 3 Perkembangan Opini di Perwakilan Jawa Timur	8
Tabel 4 Tindak Lanjut atas evaluasi AKIP 2021	12
Tabel 5 Target dan Capaian Hasil Evaluasi AKIP	12
Tabel 6 Skor IKU BPK Jatim Tahun 2022	13
Tabel 7 Pencapaian Skor IKU 5 Tahun terakhir	14
Tabel 8 Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir	15
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun	16
Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2022	18
Tabel 12 Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Target akhir Periode Renstra	19
Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2022	21
Tabel 14 Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Target akhir Periode Renstra	22
Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2022	25
Tabel 16 Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Target akhir Periode Renstra	26
Tabel 17 Pencapaian Persentase TLRHP Tahun 2022	27
Tabel 18 Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2022	29
Tabel 19 Perbandingan Realisasi IKU 4 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024	30
Tabel 20 Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2022	32
Tabel 21 Perbandingan Realisasi IKU 5 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024	33
Tabel 22 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2022	35
Tabel 23 Perbandingan Realisasi IKU 6 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024	35
Tabel 24 Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2022	37
Tabel 25 Perbandingan Realisasi IKU 7 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024	38
Tabel 26 Usulan atas perbaikan pemahaman nilai dasar pegawai tahun 2021	38
Tabel 27 Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2022	41
Tabel 28 Perbandingan Realisasi IKU 8 pada BPK Jatim	42
Tabel 29 Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2022	46
Tabel 30 Perbandingan Realisasi IKU 9 pada BPK Jatim terhadap target	47
Tabel 31 Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2022	50

Tabel 32 Perbandingan Realisasi IKU 10 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024	50
Tabel 33 Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2022	53
Tabel 34 Perbandingan Realisasi IKU 11 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024	53
Tabel 35 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2022	55
Tabel 36 Perbandingan Realisasi IKU 12 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024	55
Tabel 37 Pencapaian Pemenuhan Jam Diklat Tahun 2022	56
Tabel 38 Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2022	58
Tabel 39 Perbandingan Realisasi IKU 13 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024	58
Tabel 40 Pencapaian Kinerja Anggaran Tw I s.d IV 2021	59
Tabel 41 Nilai IKU tahunan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perjanjian Kinerja Perwakilan Jawa Timur.....	11
Gambar 2 Kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Kalan kepada Pegawai.....	12
Gambar 3 Kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Kepala Sekretariat kepada Pegawai Tidak Tetap..	13
Gambar 4 Pengarahan dan Sambutan Kalan dalam Kegiatan Pembukaan Pemantauan TLRHP Semester II 2023	26
Gambar 5 Penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari pada Pemprov Jatim	31
Gambar 6 Penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting pada Pemkab Jember	31
Gambar 7 Penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Kabupaten Sidoarjo	36
Gambar 8 Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tulungagung	36
Gambar 9 Screen Shoot Peringatan di Aplikasi Surat Tugas Untuk memantau Benturan Kepentingan	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dasar untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel atas kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun laporan kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku

koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Dalam hal ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pelaksana BPK berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, serta merupakan cerminan dari

prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2023.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana "Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada bagian ke dua puluh satu, Pasal 574 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Merumuskan dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Merumuskan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi serta BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- c. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- d. Menyusun program, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif ;
- e. Menetapkan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- f. Memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- g. Mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- h. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

- i. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Melaksanakan pembahasan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa ;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- m. Menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum ;
- o. Menyiapkan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi ;
- p. Melakukan Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Memutakhirkan data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
- s. Menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- t. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Jawa Timur



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Struktur Organisasi diatas sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 14/K/I-XIII.2/09/2019 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditorat Keuangan Negara V yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat Perwakilan terdiri dari enam Sub Bagian yaitu Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Keuangan, Subbagian SDM, Subbagian Hukum, Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Umum & Teknologi Informasi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

b. Subbagian Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan mengelola perpustakaan.

c. Subbagian SDM

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

d. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum bertugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

e. Subbagian Hubungan Masyarakat

Subbagian Hubungan Masyarakat bertugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan mengelola perpustakaan.

f. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi bertugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2. SubAuditorat Jawa Timur I;

Pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;

3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
12. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

3. SubAuditorat Jawa Timur II;

pada lingkup Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk.

1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
12. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

4. SubAuditorat Jawa Timur III;

SubAuditorat Jawa Timur III bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
12. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

5. SubAuditorat Jawa Timur IV;

SubAuditorat Jawa Timur IV bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
12. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

6. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan analisis kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menghadapi kendala kekurangan pemeriksa. Untuk pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan pada Semester satu dan dua, kondisi ini diatasi melalui perbantuan pegawai sekretariat. Untuk mengantisipasi penambahan pegawai pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan dalam aktivitas pada bidang layanan sarana internal.

Secara umum, kebijakan pengelolaan SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dilakukan berdasarkan sistem merit. Rencana kebutuhan pegawai disusun dengan mempertimbangkan jumlah, pangkat, kualifikasi pegawai yang ada, dan pegawai yang akan pensiun. Untuk pengembangan karir, pegawai diarahkan kepada pola karir jabatan fungsional pemeriksa, jabatan fungsional lainnya maupun jabatan pelaksana. Dengan adanya pilihan jabatan ini, seluruh pegawai mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karir sesuai dengan kompetensi dan minat yang dimiliki. Untuk pengembangan kompetensi pegawai, BPK Jawa Timur mendukung para pegawai untuk mengikuti program tugas belajar, diklat, maupun pelatihan singkat di dalam dan luar negeri. Selain itu, BPK Perwakilan Jawa Timur juga mendukung para pegawai untuk dapat berperan aktif dalam organisasi profesi maupun mengikuti program sertifikasi keahlian. Khusus untuk pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendorong pemeriksa untuk dapat memperoleh sertifikasi CSFA.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 berjumlah 294 orang pegawai yang terdiri dari 241 PNS, 2 P3K dan 32 PTT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia di BPK Jatim

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	259
2	CPNS	1
3	P3K	2
3	PTT	32
Jumlah		294

Pada tahun 2023, BPK Jatim mendapatkan tambahan satu orang pegawai dengan status CPNS dan dua orang P3K. Pegawai baru dikenalkan dengan tuntutan lingkungan kerja yaitu aktivitas rutin dalam menyelesaikan pekerjaan, kualitas kerja, jam kerja, kedisiplinan, cara dan etika memberikan pelayanan kepada konsumen/tamu/*stakeholders*, strategi komunikasi dengan sesama pegawai atau dengan pimpinan, situasi atau lingkungan budaya kerja, atau hal-hal lainnya yang dapat menarik perhatian dan layak dibicarakan/didiskusikan. Kepala Perwakilan sebagai Kepala Satker memberikan perhatian kepada pegawai dengan memberikan arahan dan motivasi agar seluruh pegawai mampu mengidentifikasi kondisi dan isu yang terjadi di Perwakilan Jawa Timur dan menemukan isu terkait tugas dan fungsi, mencari pemecahan permasalahannya agar nantinya dapat mengatasi dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan semua pihak khususnya pihak-pihak di Perwakilan Jawa Timur. Selain itu, di berbagai kesempatan, Kepala Perwakilan tidak lupa menekankan Independensi, Integritas dan Profesionalisme (IIP) dalam pelaksanaan tupoksi pegawai BPK Jatim.

2. Sumber Daya Keuangan

Dari total anggaran sebesar Rp58.204.599.000,00, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merealisasikan sebesar Rp58.087.677.452,00. RKP Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp31.221.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.201.586.797,00 atau sebesar 99,94%, sedangkan RKSP Tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp26.983.319.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.886.090.655,00 atau sebesar 99,64%.

Adapun capaian keluaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Laporan Output Per Desember 2023

No	Program/Kegiatan/Keluaran/Sub keluaran	Target (Vol.)	Realisasi (Vol.)	Penyelesaian	Realisasi Anggaran s.d Desember 2023
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	34	34	100.00%	100.00%
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	100.00%	99.63%
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	65	65	100.00%	99.88%
4	Pemeriksaan Keuangan Negara	731	731	100.00%	99.94%

Secara keseluruhan penyerapan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sangat tinggi dan tidak terdapat kendala. Berdasarkan tabel Laporan output di atas, seluruh output BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 juga telah tercapai 100% . Hal tersebut dikarenakan dalam

pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perwakilan Jawa Timur telah berpedoman pada Prosedur Operasional Standar (POS) Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran, Tata Cara Revisi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK. Untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerja anggaran, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan secara maksimal dan tepat waktu baik dari sesi pengelolaan UP, data kontrak, revisi DIPA maupun dalam hal penyelesaian tagihan.

E. Isu Strategis

Selaras dengan penyusunan Renstra BPK 2020-2024, dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 juga diperhatikan isu strategis yang sedang terjadi di internal organisasi sebagai gambaran kondisi dan capaian pada saat ini yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi serta mendorong keberhasilan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga melakukan analisis atas perkembangan lingkungan strategis di luar organisasi yang mencakup agenda pembangunan nasional dan daerah, implementasi *sustainable development goals* (SDGs), perkembangan tingkat kematangan organisasi dan tata kelola lembaga pemeriksa eksternal, perkembangan teknologi dan informasi, serta dampak pandemi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan program dan kegiatan, terutama di bidang pemeriksaan, yang sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal tersebut.

Beberapa isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada saat penyusunan Renstra 2020-2024 dan perkembangannya s.d periode 2023:

- a. Hasil evaluasi Ditama Revbang masih mengungkapkan adanya kesalahan dalam penulisan LHP dan ketidakpatuhan dalam dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan; Di tahun 2023 masih ditemukan ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan dalam penyusunan LHP walaupun telah diupayakan pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Disamping itu telah diupayakan lebih ketatnya QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I
- b. Realisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang melebihi targetnya telah diikuti dengan optimalisasi penggunaan aplikasi SMP dan SIPTL untuk

efisiensi pelaksanaan dan keakurasian database serta laporan hasil pemantauan; Selain itu BPK Jatim juga telah melakukan kegiatan percepatan pemantauan tindak lanjut untuk mendorong Pemda segera menyelesaikan tindak lanjutnya dan memanfaatkan aplikasi e-audit dengan lebih maksimal.

- c. Pada Tahun 2023, seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Timur telah memperoleh opini WTP meningkat dibanding tahun 2022.

Tabel 3 Perkembangan Opini di Perwakilan Jawa Timur

OPINI	2019	2020	2021	2022
WTP	37	38	38	39
WDP	1	0	1	0
TW	0	1	0	0
TMP	1	0	0	0

- d. Laporan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah mengungkapkan masih banyaknya kasus TP/TGR yang berupa informasi kerugian yang belum diproses penetapannya;
- e. Upaya peningkatan kompetensi pegawai masih dititikberatkan pada aspek kuantitatif untuk pemenuhan target jam pelatihan pegawai; dan
- f. Upaya untuk mempertahankan pembangunan ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang telah tercapai.

Kepala Perwakilan memberikan perhatian terhadap seluruh kegiatan di Perwakilan Jawa Timur berikut dengan evaluasinya untuk menjadikan BPK Jawa Timur yang semakin baik kedepannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 telah ditetapkan. Perencanaan strategis memuat visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, AKN V menetapkan sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki peranan strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah.

Berikut adalah visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis BPK Perwakilan Jawa Timur :

1. Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

2. Misi

- a. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

3. Nilai Dasar

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berpegang teguh pada nilai dasar antara lain :

a. Integritas

Mensyaratkan pemeriksa untuk memperhatikan jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas juga mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip obyektivitas dan independensi;

b. Independensi

Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental (*independent in fact*) dan independensi dalam penampilan perilaku (*independent in appearance*) pada saat melaksanakan pemeriksaan. Bersikap obyektif merupakan cara berpikir yang tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat

mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Untuk mempertahankan obyektivitas dan independensi maka diperlukan penilaian secara terus-menerus terhadap hubungan pemeriksa dengan entitas yang diperiksa;

c. **Profesionalisme**

Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan.

4. Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

B. Target Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 1 Perjanjian Kinerja Perwakilan Jawa Timur

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja 2023

Untuk menjaga komitmen pencapaian target kinerja dalam perjanjian kinerja diatas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja seperti terlampir dalam **lampiran 1** .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 32/ND/XI.2/1/2024 tanggal 15 Januari 2024, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 mendapatkan sebesar 91,40 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Nilai ini meningkat jika dibanding pencapaian tahun lalu dengan nilai 87,79 dengan predikat A (Memuaskan). Peningkatan nilai AKIP yang cukup signifikan merupakan hasil dari upaya perbaikan dan tindak lanjut atas evaluasi AKIP oleh Itama pada tahun tahun sebelumnya.

Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga telah melaksanakan pemantauan capaian evaluasi AKIP untuk memonitor dan mengevaluasi capaian AKIP agar optimal. Adapun Target dan capaian evaluasi AKIP selama periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Target dan Capaian Hasil Evaluasi AKIP

2020		2021		2022		2023	
Target (PK)	Realisasi	Target (PK)	Realisasi	Target (PK)	Realisasi	Target (PK)	Realisasi
86,00 (A)	88,90 (A)	86,00 (A)	88,43 (A)	88,00 (A)	87,79 (A)	89,00 (A)	91,40 (AA)



Gambar 2 Kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Kalan kepada Pegawai



Gambar 3 Kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Kepala Sekretariat kepada Pegawai Tidak Tetap

Atas evaluasi AKIP oleh Itama, BPK Jatim menindaklanjuti dengan telah melaksanakan penjenjangan kinerja sampai dengan individu di lingkungan BPK Jawa Timur, melalui SKP-IKI, memanfaatkan portal kolaborasi dalam pengumpulan data/dokumen kinerja, menggunakan aplikasi PRISMA dalam pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan, mengupayakan usulan *Best Practice* baru sebagai upaya dukungan bagi organisasi meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, upaya menyempurnakan penyusunan laporan Kinerja, serta upaya peningkatan capaian kinerja baik yang bersifat output maupun outcome.

B. Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Perwakilan Jawa Timur seperti yang termuat dalam Renstra BPK Jatim 2020-2024 adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi dengan strategi meningkatnya kualitas Pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif dan strategi kegiatan meningkatnya pemeriksaan yang bermutu Tinggi.

Selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Jawa Timur telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, meliputi evaluasi pencapaian target pada pertengahan semester, monitoring tindak lanjut hasil evaluasi AKIP, dan pemenuhan rencana aksi target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

Pada Tahun 2023, skor kinerja Perwakilan Jawa Timur adalah sebesar 100,25%. Skor tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 100,15%. Skor capaian kinerja menunjukkan tren seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5 Pencapaian Skor IKU pada periode Renstra 2020-2024

Skor 2020	Skor 2021	Skor 2022	Skor 2023
99,94	100,09	100,15	100,25

Tren capaian skor kinerja juga dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 1 Tren Capaian IKU periode Renstra 2020-2024



Berdasarkan grafik diatas, pencapaian skor IKU BPK Jatim di Periode Renstra 2020-2024 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara lebih rinci, capaian kinerja Tahun 2023 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6 Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Skor
SASARAN KEGIATAN				100,25
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	87.69%	87,69
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100.00%	100,00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	91.74%	105,00

Indikator Kinerja Utama		Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Skor
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	101,74%	101,74
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	101,00%	101,00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	4.62	92,40
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89	91.40	102,70
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	96.52%	98,49
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	103,33%	103,33
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4.15	105,00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	88,65%	100,16

Adapun perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi		
			Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi - Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	87.69%	82.75%	89.25%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	91.74%	88.88%	86.05%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	101,74%	101.11%	100.44%
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	101,00%	100.14%	100.95%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	102.38%	100.82%

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi		
			Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	4.62	4,70	4,39
	Hasil Evaluasi AKIP	89	91.40	87.79%	88,43%
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	96.52%	96.55%	98.79%
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	103,33%	105.83%	100.00%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4.15	4,22	3,86
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	88,65%	89.16%	90.50%

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

No	Indikator Kinerja Utama		Tahun Kinerja 5 Tahunan					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	IKU 1	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	88%	87.69	87.69%
2	IKU 2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00%
3	IKU 3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	92%	105.00	122.33%
4	IKU 4	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	100%	100%	100%	100%	100%	102%	101.74	101.74%
5	IKU 5	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101.00	101.00%
6	IKU 6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00%

No	Indikator Kinerja Utama		Tahun Kinerja 5 Tahunan					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
			2020	2021	2022	2023	2024			
		pemeriksaan tematik lokal								
7	IKU 7	Indeks implementasi Nilai Dasar BPK	5	5	5	5	5	4.62	92.40	92.40%
8	IKU 8	Hasil evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	AA	AA	AA
			86	87	88	89	90.05	91.4	105.00	101.50%
9	IKU 9	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi	95%	96%	97%	98%	100%	97%	105.00	96.52%
10	IKU 10	Tingkat penerapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	103%	105.00	103.33%
11	IKU 11	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.15	105.00	98.81%
12	IKU 12	Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105.00	100.00%
13	IKU 13	Tingkat kinerja anggaran	83%	84%	84%	84.50%	85.70%	88.65%	105.00	103.44%

Selanjutnya, perbandingan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (IKU 1)

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP

METODE PENGUKURAN

Indikator ini terdiri dari 2 sub IKU, yaitu Hasil QA dan QC Satker (a), Hasil Evaluasi EPP (b): Tingkat Konsistensi (40%); Tingkat Akurasi (60%) (c) dengan formula perhitungan $(40\% \times a) + (40\% \times b) + (60\% \times c)$.

SUMBER DATA

1. Lembar checklist QA dan QC
2. Hasil Evaluasi EPP

REALISASI 2023

Perkembangan capaian IKU 1 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 9 Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2023

IKU. 1	Tahun				
(Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi *)	84.38%	89.25%	82.75%	87.69%	
Capaian	84.38	89.25	82.75	87.69	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	0.00	4.87	-6.5	4.94	

Realisasi IKU Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan Tahun 2023 adalah 87,69% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 87,40. Dari tabel diatas terlihat bahwa meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2023 terdapat kenaikan skor IKU pengendalian dan perolehan keyakinan mutu yaitu sebesar 4,94 poin.

Berdasar hasil evaluasi EPP melalui Nota Dinas No. 428/ND/XII.2/09/2023 tanggal 13 September 2023 masih ditemukan ketidak akuratan, ketidakkonsistenan dan kesalahan lainnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK Jatim. Konsistensi penyajian LHP mendapatkan nilai 56,41% sedangkan keakuratannya mendapatkan nilai 94,87%, sehingga nilai keakuratan dan konsistensi LHP LKPD adalah 79,49%. Atas hasil evaluasi Direktorat EPP ditemukan bahwa dari 39 LHP Keuangan yang diterbitkan pada Semester I 2023, terdapat 39 kasus dari 17 LHP yang kurang memenuhi aspek konsistensi, dua kasus dari dua LHP yang kurang memenuhi aspek akurasi, dan 113 kasus dari 38 LHP yang terdapat kesalahan lainnya.

Untuk meningkatkan capaian IKU 1 Tahun 2023, Kepala Perwakilan Jawa Timur telah menerbitkan Nota Dinas Nomor 154/ND/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Himbauan Peningkatan Akurasi dan Konsistensi dalam Penyajian LHP. Nota Dinas ini

diterbitkan pada saat Tim Pemeriksa LKPD TA 2023 sedang dalam proses menyusun konsep LHP sebagai upaya preventif untuk mengurangi bahkan meniadakan kesalahan dalam penyusunan LHP. Melalui Nota Dinas tersebut, Kepala Perwakilan menghimbau kepada seluruh Tim Pemeriksa untuk dapat meningkatkan akurasi dan konsistensi penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 agar LHP yang diterbitkan BPK Jatim sebagai produk utama dari BPK tidak boleh mengandung kesalahan (*zero defect*) agar terhindar dari risiko hukum atas semua tuntutan atau gugatan terhadap LHP BPK, namun dalam evaluasi atas keakuratan, konsistensi dan kesalahan lainnya masih ditemukan dalam penyajian LHP LKPD Tahun 2022. Berdasar evaluasi internal kepada tim pemeriksa di Jawa Timur, hal ini dimungkinkan terjadi karena waktu penyelesaian LHP cukup terbatas. Para pemeriksa menghadapi tenggat waktu penyelesaian LHP yang ketat dengan intensitas pekerjaan yang tinggi sehingga proses reviu berjenjang juga dilaksanakan dalam waktu yang sempit ditambah pekerjaan yang dilakukan serentak.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU 1 di tahun 2023 Perwakilan Jawa Timur telah berupaya meningkatkan pemenuhan Quality Control (QC) pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui laporan mingguan dan diskusi mingguan,, juga upaya pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tingkatan eksternal melalui hasil evaluasi EPP.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 10 Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target akhir Periode Renstra

No	Indikator Kinerja Utama		Tahun Kinerja 5 Tahunan					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	IKU 1	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	87.69	87.69%

Seperti tahun sebelumnya, realisasi IKU 1 belum mencapai target Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat terus meningkat dan optimal hingga Tahun 2024.

Untuk melaksanakan IKU 1, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran Pemeriksaan Terinci sebesar Rp18.408.415.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.388.949.034,00 atau sebesar 99,89%.

Pemeriksaan Terinci pada Perwakilan Jawa Timur terdiri dari :

1. Pemeriksaan Terinci LKPD pada 39 Pemerintah Prov/Kab/Kota ;
2. Pemeriksaan Terinci Kinerja sebanyak 14 objek pemeriksaan;
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 27 objek pemeriksaan.

ANALISIS DAN EVALUASI

Pelaksanaan QC dan QA dari KT, PT dan PJ melalui laporan mingguan dan diskusi mingguan serta *focus grup discussion* untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD masih kurang optimal karena masih ditemukan kesalahan konsistensi, akurasi maupun kesalahan lainnya.

Dalam rangka mencapai Strategi 2 - meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif yang keberhasilannya salah satunya diukur melalui indikator ini, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Jatim adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses revidi secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

Di tahun mendatang akan semakin diefektifkan revidi silang antar tim pemeriksa dan antar unit kerja pemeriksa untuk mengurangi kesalahan akurasi angka, konsistensi dan kesalahan lainnya. Anggota tim, ketua tim, dan pengendali teknis didorong untuk lebih aktif dan berbagi tugas melakukan cek list atas LHP agar tidak ditemukan lagi kesalahan saat evaluasi LHP oleh EPP.

2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan (IKU 2)

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

METODE PENGUKURAN

Indikator ini dihitung berdasar dua komponen, yaitu yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan (a) dan Jumlah LHP yang diterbitkan (b)

SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan berupa LHP Kinerja dan PDTT yang diterbitkan.

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 2 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2023

IKU. 2	Tahun				
(Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi *)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Capaian	100	100	100	100.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	0.00	0.00	0.00	0.00	

Realisasi IKU (Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan) Tahun 2023 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh hasil pemeriksaan Kinerja dan PDTT di BPK Jatim tahun 2023, telah memenuhi harapan penugasan yang ditunjukkan dari kesesuaian simpulan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDTT yang telah sesuai dengan Program Pemeriksaan (P2). IKU 2 telah terealisasi dan memenuhi target yang ditetapkan, artinya BPK Jatim telah melaksanakan seluruh kegiatan pemeriksaan yang telah direncanakan dan diharapkan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas bagi Pemerintah Daerah khususnya di Jawa Timur.

Realisasi IKU Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan cenderung stabil dari tahun ke tahun dan akan dipertahankan pencapaiannya hingga periode kedepan.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 12 Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Target akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00

realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan telah mencapai target tahun 2023 dan diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir periode Renstra Tahun 2024.

Seluruh Harapan Penugasan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Tahun 2023 pada Perwakilan Jawa Timur adalah terdiri dari :

1. 14 objek Pemeriksaan Terinci Kinerja yaitu ;
 - a. Kinerja Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Ngawi
 - b. Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Terpadu untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Instansi Terkait Lainnya di Banyuwangi dan Sidoarjo
 - c. Kinerja Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Jember
 - d. Kinerja Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Lamongan
 - e. Kinerja Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk
 - f. Kinerja Efektivitas Pengelolaan BUMD pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
 - g. Kinerja Efektivitas Pengelolaan BUMD pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan
 - h. Kinerja Efektivitas Pengelolaan BUMD pada Pemerintah Kabupaten Sampang
 - i. Kinerja Efektivitas Pengelolaan BUMD pada Pemerintah Kabupaten Tuban
 - j. Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Terpadu untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d Semester

I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo dan Sidoarjo

- k. Kinerja Efektifitas Pengelolaan BUMD pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo
 - l. Kinerja Efektifitas Pengelolaan BUMD pada Pemerintah Kabupaten Kediri
 - m. Kinerja atas Peran Pemda dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Provinsi Jawa Timur
 - n. Kinerja Efektifitas Pengelolaan BUMD pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo
2. 27 objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yaitu :
- a. PDTT Belanja pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek
 - b. PDTT Belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
 - c. PDTT Belanja Pemerintah Kabupaten Magetan
 - d. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Gresik
 - e. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
 - f. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Surabaya
 - g. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Batu
 - h. PDTT Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan
 - i. PDTT Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan
 - j. PDTT Belanja Daerah Kabupaten Sumenep
 - k. PDTT Pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Jember
 - l. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
 - m. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan
 - n. PDTT Pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Surabaya
 - o. PDTT Pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Madiun
 - p. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Jombang
 - q. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Pacitan
 - r. PDTT Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung
 - s. PDTT Pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - t. PDTT Pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo
 - u. PDTT Pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Malang
 - v. PDTT Pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Kediri
 - w. PDTT Belanja Kabupaten Blitar
 - x. PDTT Belanja Kabupaten Malang
 - y. PDTT Belanja Kabupaten Bondowoso
 - z. PDTT Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Malang

aa. PDDT Belanja Kabupaten Situbondo

telah memenuhi seluruh harapan penugasan yang telah direncanakan didalam Program Pemeriksaan.

Untuk melaksanakan IKU 2, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran Pemeriksaan Terinci sebesar Rp10.604.082.114,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.584.617.368,00 atau sebesar 99,89%.

ANALISIS DAN EVALUASI

Keberhasilan BPK jatim mencapai target IKU 2 didukung berbagai upaya yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, antara lain :

1. Rapat Koordinasi untuk meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan, memastikan tercapainya simpulan LHP di Perwakilan Jawa Timur sesuai harapan penugasan yang telah ditetapkan dalam P2;
2. Memastikan penyusunan P2 LHP (terinci) secara berjenjang;
3. Melaksanakan reviu berjenjang Penyusunan P2 LHP (terinci); dan
4. Memastikan Hasil Pemeriksaan LKPD dengan simpulan yang telah sesuai dengan P2.

Dalam rangka mencapai Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang keberhasilannya salah satunya diukur melalui indikator ini, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah mengoptimalkan perencanaan pelaksanaan pemeriksaan dan mempertimbangan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh pemeriksaan dapat dilaksanakan baik pemeriksaan yang bersifat mandatory, permintaan stakeholders maupun pemeriksaan tematik nasional dan lokal sesuai arahan Badan.

Di tahun mendatang akan semakin ditingkatkan reviu berjenjang Penyusunan LHP Kinerja dan PDDT untuk mendapatkan simpulan yang sesuai dengan Harapan Penugasan pada Program Pemeriksaan.

3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (IKU 3)

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah. Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

METODE PENGUKURAN

Indikator ini dihitung dengan mempertimbangkan Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (a), Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (b), Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (c) Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (d) Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee* (e)

SUMBER DATA

Data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di tarik dari aplikasi SMP.

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 3 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2023

IKU. 3	Tahun				
<i>(Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%
Realisasi *)	86.95%	86.05%	88.88%	91.74%	
Capaian	105	105	105	105.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	0.00	0.00	0.00	

Realisasi IKU persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2023 adalah sebesar 91,74%, meningkat setiap tahun sejak tahun 2020. Capaiannya di tahun ini adalah sebesar 105.

Capaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 33.765, jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 2.915 , jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 126, Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 29, dan Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee* sebanyak 36.835 (sesuai nilai TLRHP dalam lampiran 3 SMP)

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 14 Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	91,74%	122,33%

realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 105%.

Perolehan IKU 3 selama 2023 terlihat positif dengan angka sebagai berikut :

Tabel 15 Pencapaian Persentase TLRHP Tahun 2023

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	88,88%	75%	90,75%	75%	90,75%	75%	91,74%

Berbagai langkah yang telah ditempuh BPK Jatim terbukti dapat menaikkan pencapaian IKU 3 sehingga dapat diteruskan di masa yang akan datang. Untuk mendukung ketercapaian IKU 3, BPK Jatim akan selalu mengupayakan langkah-langkah yang strategis dan simultan dalam pelaksanaan pemantauan TLRHP.



Gambar 4 Pengarahan dan Sambutan Kalan dalam Kegiatan Pembukaan Pemantauan TLRHP Semester II 2023

ANALISIS DAN EVALUASI

Ketercapaian target IKU 3, didukung komitmen dan peran aktif Kepala Perwakilan dan jajarannya dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan antara lain melalui :

1. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL;
2. Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL;
3. Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS);
4. mendorong Pemerintah Daerah melakukan input data TL melalui SIPTL;
5. melaksanakan kegiatan percepatan pemantauan Tindak Lanjut;
6. serta melaksanakan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada setiap semester.

Dalam rangka mencapai Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang keberhasilannya salah satunya diukur melalui indikator ini, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK adalah dengan merubah metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Aplikasi SIPTL merupakan aplikasi atas pemantauan TLRHP yang dapat diakses oleh entitas yang diperiksa untuk mengunggah dokumen tindak lanjut dan memantau penetapan status tindak lanjut oleh BPK. Aplikasi ini juga digunakan oleh internal BPK untuk validasi dokumen, penelaahan, validasi tindak lanjut dan persetujuan penetapan status TLRHP secara berjenjang. Adanya perubahan metodologi pemantauan ini memberikan manfaat bagi internal BPK dan pihak entitas yang diperiksa. Manfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak entitas yang diperiksa berupa efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas dan belanja barang, serta fleksibilitas waktu pemantauan status TLRHP.

Di tahun mendatang akan diupayakan terlaksananya kegiatan pemantauan tindak lanjut tiap semester dan juga pemantauan recommitmen Tindak Lanjut untuk memaksimalkan pencapaian IKU 3.

Sampai dengan bulan Desember 2023, Perwakilan Jawa Timur telah melaksanakan pemantauan TLRHP Semester I dan Semester II Tahun 2023 menggunakan anggaran pada keluaran Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yaitu sebesar Rp1.248.761.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.248.759.512,00 atau sebesar 100,00%.

4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional (IKU 4)

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/ lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/ tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'

METODE PENGUKURAN

Indikator ini diukur dengan mempertimbangkan Realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya (a), Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/signifikan lainnya(b), dan Alokasi penambahan skor (c), dimana alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya

SUMBER DATA

1. BAST LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya
2. Surat Keluar Penyampaian LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya
3. LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya
4. RKP
5. Surat Tugas Pemeriksaan LHP tematik Nasional/Signifikan Lainnya

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 4 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2023

IKU. 4	Tahun				
<i>(Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi *)	101.10%	100.44%	101.11%	101.74%	
Capaian	100	100.44	101.11	101.74	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	0.44	0.67	0.63	

Realisasi IKU Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional Tahun 2023 adalah sebesar 101,74% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 101,11. IKU 4 direalisasikan dengan melaksanakan :

- Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya di Lamongan dan Sidoarjo;
- Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya di Ngawi dan Sidoarjo;
- Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Instansi Terkait Lainnya di Nganjuk dan Sidoarjo;
- Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya di Jember dan Sidoarjo;
- Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemkab Ponorogo;
- Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa

untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemkab Banyuwangi; dan

- g. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan I

Realisasi IKU 4 tahun 2023 tercapai, sama dengan tahun sebelumnya karena komitmen BPK Jatim terlibat dalam pemeriksaan tematik Nasional.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi IKU 4 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101.74%	101.74

realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 101,74%.

Untuk melaksanakan IKU 4 tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,303,732,094,00 dan telah terealisasi 100%.

ANALISIS DAN EVALUASI

IKU 4 merupakan upaya BPK dalam penerapan strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat (pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik) dan Penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/D dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut.

Dalam merencanakan anggaran 2023, BPK Jatim telah memastikan alokasi dan mengawal anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional dapat terlaksana. Target IKU 4 tercapai karena komitmen bersama antara pimpinan dan pelaksana pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendukung kebijakan pemeriksaan yang ditentukan oleh Pimpinan BPK.

Di tahun mendatang akan diupayakan terpenuhinya pemeriksaan tematik nasional dengan mengawal perencanaan pemeriksaan dan anggaran untuk pemeriksaan semester II.



Gambar 5 Penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari pada Pemprov Jatim



Gambar 6 Penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting pada Pemkab Jember

5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan (IKU 5)

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

METODE PENGUKURAN

IKU 5 diukur dengan mempertimbangkan Jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait (Ref.) (a) dan Alokasi penambahan skor (b)

SUMBER DATA

Surat Tugas pemeriksaan dari pemangku kepentingan

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 5 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 18 Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2023

IKU. 5	Tahun				
(Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi *)	100.00%	100.95%	100.14%	101.00%	
Capaian	100	100.95	100.14	101.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	0.95	-0.81	0.86	

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 adalah sebesar 101% dari target sebesar 100%.

Pada Tahun 2023 tidak terdapat permintaan penghitungan kerugian negara kepada BPK Jatim. Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 19 Perbandingan Realisasi IKU 5 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	101.00	101.00%

realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100,00%.

Untuk melaksanakan IKU 4 tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp194,214,000,00 dan telah terealisasi 100%.

ANALISIS DAN EVALUASI

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan investigatif didukung dengan peningkatan sinergi antara BPK dengan IPH dalam merespons seluruh permintaan pemeriksaan, serta menentukan prioritas permintaan pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan signifikansi dampak, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan mandat BPK.

Realisasi IKU 5 tercapai dengan merespon dan mengikuti prosedur Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan jika ada permintaan pemeriksaan, melakukan evaluasi, dan jika hasil evaluasi menyatakan permintaan pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan akan diajukan revisi RKP untuk memastikan ketersediaan anggaran pemeriksaannya.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam memenuhi pemeriksaan pemangku kepentingan adalah dengan mengelola permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan khususnya terkait permintaan Investigasi dalam satu Unit Kerja Eselon I yaitu Auditorat Utama Investigasi (AUI). Sebelum dibentuk AUI, proses ini dilaksanakan oleh masing-masing satker pemeriksaan pusat dan perwakilan dimana membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama mulai proses persetujuan sampai dengan finalisasi LHP. Setelah dibentuk AUI, pemeriksaan dilaksanakan lebih cepat mulai proses persetujuan sampai dengan finalisasi LHP.

Di tahun mendatang akan diupayakan terpenuhinya IKU 5 dengan segera merespon permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai permintaan dengan berpedoman pada prosedur yang ada untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal (IKU 6)

DEFINISI

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

METODE PENGUKURAN

Indikator ini terdiri dari Realisasi pemeriksaan tematik lokal (a), Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal (b), dan Alokasi penambahan skor (c). Untuk mendapatkan skor IKU 6, digunakan formula $((a / b) \times 100\%) + c$. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan pemenuhan permintaan dari pemangku kepentingan.

SUMBER DATA

1. BAST LHP Tematik Lokal
2. Surat Keluar Penyampaian LHP Tematik Lokal
3. LHP Tematik Lokal
4. RKP
5. Surat Tugas Pemeriksaan LHP tematik lokal

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 6 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 20 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2023

IKU. 6	Tahun				
(Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi *)	100.00%	100.82%	102.38%	100.00%	
Capaian	100	100.82	102.38	100.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	0.82	1.56	-2.38	

Realisasi IKU Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. IKU 4 telah direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022, yaitu melalui Pemeriksaan :

1. Kinerja Perijinan Kab Gresik, Kab Madiun dan Kab Malang, dan Pemeriksaan atas Kinerja Kemandirian Fiskal Kab Magetan, Kab Tuban dan Kota Probolinggo pada Tahun 2021;
2. Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Banyuwangi, dan Tulungagung pada Tahun 2022.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi IKU 6 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00%

realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tidak mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal di tahun 2023.

ANALISIS DAN EVALUASI

IKU 6 merupakan upaya BPK dalam penerapan strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan

pemeriksaan sesuai mandat (pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik) dan Penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/D dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut.

Karena telah melaksanakan pemeriksaan tematik lokal, yaitu di tahun 2021 dan 2022, BPK Jawa Timur tidak wajib melaksanakan pemeriksaan tematik lokal lagi. Dalam merencanakan anggaran 2024, BPK Jatim tetap berkomitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 7 Penyerahan LHP Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Kabupaten Sidoarjo



Gambar 8 Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tulungagung

7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK (IKU 7)

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Adapun Skala hasil survei IKU 7 dibagi menjadi :

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

METODE PENGUKURAN

-

SUMBER DATA

Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 7 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 22 Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2023

IKU. 7	Tahun				
(Indeks implementasi Nilai Dasar BPK)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Realisasi *)	4.61	4.39	4.70	4.62	
Capaian	92.2	87.8	94.00	92.40	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	-4.40	6.20	-1.60	

Realisasi IKU 7 Indeks implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2023 adalah sebesar 4,62 dari target sebesar 5,00 sehingga capaiannya sebesar 92,40. Realisasi IKU 7 belum pernah mencapai target sejak periode tahun 2020 dan pencapaiannya cenderung fluktuatif. Berdasar evaluasi internal kepada pegawai, nilai IKU 7 tidak maksimal karena pertanyaan survei yang memiliki jawaban hampir sama, dan akhirnya memberikan keraguan dalam memilih jawaban.

Nilai IKU 7 yang belum mencapai target menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam memberikan pemahaman kepada para pegawai tentang indeks implementasi dasar.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 23 Perbandingan Realisasi IKU 7 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	5	5	5	5	4,62	92.40%

Beberapa hal masukan dari responden yang pernah di *release* dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan nilai indeks Implementasi Nilai Dasar BPK di masa mendatang diantaranya :

Tabel 24 Usulan atas perbaikan pemahaman nilai dasar pegawai yang diterbitkan di tahun 2021

No	Saran/Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Meningkatkan sosialisasi atas implementasi nilai dasar BPK	342	28,98%
2	Meningkatkan pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan BPK	238	20,17%
3	Implementasi Nilai Dasar pegawai sudah baik untuk mendukung tercapainya visi dan misi BPK	218	18,47%
4	Memberikan reward dan punishment secara adil terhadap pelaksanaan implementasi nilai dasar	180	15,25%
5	Memberikan pendampingan implementasi nilai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan	123	10,42%
6	Meningkatkan implementasi nilai dasar secara konsisten dan berkesinambungan	79	6,69%
	Jumlah	1180	100%

ANALISIS DAN EVALUASI

Sebagai upaya menegakkan nilai nilai dasar BPK, BPK Jatim telah melakukan monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan

memonitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa agar tidak lebih dari tiga kali memeriksa berturut-turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD, Mengembangkan aplikasi Surat Tugas untuk pengendalian Benturan Kepentingan, Melaksanakan kegiatan pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP secara berkala, melakukan Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja BPK Jatim, Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD, dan telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai untuk memaksimalkan penilaian hasil pengisian kuisioner implementasi nilai dasar.



Gambar 9 Screen Shoot Peringatan di Aplikasi Surat Tugas Untuk memantau Benturan Kepentingan

Capaian indikator indeks implementasi nilai dasar BPK turun, dari yang sebelumnya 4,70 di tahun 2022 menjadi 4,62 di tahun 2023. Tidak tercapainya target IKU 7 disebabkan masih terdapat pegawai yang belum memahami sepenuhnya mengenai nilai dasar BPK.

Berdasar masukan responden saat pengisian kuisioner indeks implementasi nilai dasar tahun 2021, yang perlu ditingkatkan dalam pemahaman nilai dasar adalah sosialisasi dalam bentuk konkrit dan menarik serta ditingkatkannya pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan di BPK.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam pengukuran indikator ini adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi digital. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak surveyor. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih

representatif, dan hasil survei realtime. Sedangkan manfaat bagi pihak surveyor berupa efisiensi tenaga surveyor, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei secara *realtime*.

Pada Tahun mendatang, sosialisasi/internalisasi nilai-nilai dasar kepada seluruh pegawai diupayakan lebih maksimal ditambah dengan simulasi bersama pengisian survei indeks nilai dasar di setiap unit kerja.

8. Hasil Evaluasi AKIP (IKU 8)

DEFINISI

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, and pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permen PAN RB 88/2021 Pasal 1 (2)). Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK.

Evaluasi dilaksanakan dalam dua tahap:

1. Self- assessment oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK
2. Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (sampling).

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK

METODE PENGUKURAN

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

1. AA = Sangat Memuaskan (>90-100) jika telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk tata Kelola yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2. A = Memuaskan (>80-90) jika terdapat gambaran bahwa satuan kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan tata Kelola berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
3. BB = Sangat Baik (>70-80) jika Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 satuan kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 3/Koordinator

4. B = Baik (>60-70) jika Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 satuan kerja, khususnya pada unit kerja utama.
5. CC = Cukup (>50-60) jika terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar
6. C = Kurang (>30-50) jika sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar
7. D = Sangat Kurang (0-30) jika sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar

SUMBER DATA

Hasil evaluasi AKIP oleh Itama dan hasil evaluasi mandiri satuan kerja

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 8 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 25 Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2023

IKU. 8	Tahun				
(Hasil evaluasi AKIP)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A	A	A	A	A
	86	87	88	89	90.05
Realisasi *)	A	A	A	AA	
	88.9	88.43	87.79	91.4	
Capaian	103.37	101.64	99.76	105.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	0	-1.73	-1.88	5.24	

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 32/ND/XI.2/1/2024 tanggal 15 Januari 2024, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 mendapatkan sebesar 91,40 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Nilai ini meningkat jika dibanding pencapaian tahun lalu yaitu 87,79 dengan predikat A (Memuaskan). Peningkatan nilai AKIP yang cukup signifikan merupakan hasil dari upaya perbaikan dan tindak lanjut yang dilaksanakan BPK Jatim atas evaluasi AKIP oleh Itama pada tahun tahun sebelumnya.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi IKU 8 pada BPK Jatim terhadap target Renstra

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	86	87	88	89	90,05	91,4	101.50%

realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP telah melampaui target Tahun 2023. Diharapkan capaian ini dapat terus meningkat dan optimal hingga tahun 2024.

ANALISIS DAN EVALUASI

Pencapaian IKU 8 diupayakan diantaranya melalui tindak lanjut rekomendasi Itama atas evaluasi AKIP, melaksanakan evaluasi Pencapaian Target Kinerja di semester I, melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada kriteria yang ditetapkan SAKIP, dan menyusun Laporan Kinerja mengacu keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Periode Renstra 2020-2024, hasil evaluasi AKIP digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan. Upaya efisiensi IKU 8 dilakukan dengan penggunaan aplikasi E-SAKIP untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada satuan kerja untuk menghemat waktu dan anggaran perjalanan dinas.

Atas Rekomendasi Itama dalam evaluasi AKIP, BPK melaksanakan penjenjangan kinerja sampai dengan individu di lingkungan BPK Jawa Timur, melalui SKP-IKI, memanfaatkan portal kolaborasi dalam pengumpulan data/dokumen kinerja, menggunakan aplikasi PRISMA dalam pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan, mengupayakan usulan Best Practice baru sebagai upaya dukungan bagi organisasi meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, upaya menyempurnakan penyusunan laporan Kinerja, serta upaya peningkatan capaian kinerja baik yang bersifat output maupun outcome.

Di tahun mendatang, Perwakilan Jawa Timur akan tetap melaksanakan evaluasi secara berkala sebagai upaya mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian skor IKU 8 serta akan lebih diintensifkan koordinasi semua unit kerja dalam menindaklanjuti evaluasi AKIP berikut perbaikan pendokumentasian tindak lanjut rekomendasi AKIP untuk memudahkan pemantauannya.

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (IKU 9)

DEFINISI

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL). Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi **SISDM** diukur dengan memperhatikan kebaruan data (updating) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi **JASMIN** diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi **SMP** diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi **SiAP** diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, reviu, dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi **SiPTL** diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

IKU 9 terdiri dari 4 sub IKU sebagai berikut :

- Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SDM;
- Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi Jasmin;
- Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP;
- Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP;
- Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL;

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

METODE PENGUKURAN,

IKU 9 terdiri dari :

- a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (a),

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM dihitung dari rata-rata pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai

$$\frac{\text{Jumlah pegawai wajib lapor LHKPN yang memutakhirkan data X 100\%}}{\text{Jumlah seluruh pegawai wajib lapor LHKPN}}$$

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memutakhirkan data alamat domisili X 100\%}}{\text{Jumlah seluruh pegawai*}}$$

*) ASN, PPPK, Tenaga Tidak Tetap, dan CASN

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memutakhirkan riwayat pendidikan dinas X 100\%}}{\text{Jumlah seluruh pegawai*}}$$

*) pegawai ASN dan PPPK (tidak termasuk Tenaga Tidak Tetap, pegawai TB, dan CASN)

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memutakhirkan data riwayat SPT X 100\%}}{\text{Jumlah seluruh pegawai yang telah memiliki NPWP*}}$$

*) pegawai ASN dan PPPK (tidak termasuk Tenaga Tidak Tetap, dan CASN)

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memutakhirkan data informasi pegawai X 100\%}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}}$$

- b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (b),

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN dihitung dari rata-rata log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk.

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang Akses Aplikasi Jasmin X 100\%}}{\text{Jumlah Pejabat Struktural}}$$

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut atas Surat Masuk X 100\%}}{\text{Jumlah Surat Masuk}}$$

- c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (c),

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP dihitung dari rata-rata persentase LHP Terinci yang diinput ke SMP dan persentase softcopy LHP Terinci yang diunggah ke SMP.

$$\frac{\text{Jumlah LHP Terinci yang diinput ke SMP} \times 100\%}{\text{Jumlah rencana objek pemeriksaan terinci pada tahun berjalan}}$$

$$\frac{\text{Jumlah Softcopy LHP Terinci yang diunggah ke SMP} \times 100\%}{\text{Jumlah LHP Terinci}}$$

- d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (d), dan

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP dihitung dari rata-rata persentase Pengukuran Pemanfaatan SiAP dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) dan Pemanfaatan SiAP dalam Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

$$\left[\frac{\text{Jumlah HP3 Validasi Ketua Tim}}{\text{Jumlah PKP Tim}} \times 100\% \right] \times \frac{\text{Jumlah RKP Kinerja \& DTT dengan SIAP}}{\text{Jumlah RKP Kinerja dan DTT}}$$

$$\left[\frac{\text{Jumlah HP3 Validasi Ketua Tim}}{\text{Jumlah PKP Tim}} \times 100\% \right] \times \frac{\text{Jumlah RKP Kinerja \& DTT dengan SIAP}}{\text{Jumlah RKP Kinerja dan DTT}}$$

- e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (e) .

Jumlah Bahan TL adalah Bahan TL yang dikirimkan oleh entitas melalui aplikasi SiPTL
Pembilang: Jumlah Bahan TL yang memiliki status read di aplikasi SiPTL pada tahun berjalan. Status read disematkan pada Bahan TL yang paling sedikit telah dibuka dan dibaca oleh Kasubaud Satuan Kerja yang bersangkutan. c. Penyebut: Jumlah seluruh Bahan TL yang dikirimkan oleh entitas melalui aplikasi SiPTL pada tahun berjalan

$$\frac{\text{Jumlah Bahan TL yang memiliki status read} \times 100\%}{\text{Jumlah Bahan TL yang dikirimkan oleh entitas}}$$

- f. Untuk mendapatkan hasil penilaian IKU 9, digunakan formula
 $(20\% \times a) + (15\% \times b) + (20\% \times c) + (20\% \times d) + (25\% \times e)$.

SUMBER DATA

Laporan monitoring Biro TI atas pemantauan layanan TI Activity, Moderate Persentase

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 9 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 27 Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2023

IKU. 9	Tahun				
<i>(Tingkat pemanfaatan teknologi informasi)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	95%	97,00%	98,00%	100,00%
Realisasi *)	99%	99%	96,55%	96,52%	
Capaian	103,99	102,91	99,53	98,49	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	-1,08	-3,38	-1,04	

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi tahun 2023 adalah sebesar 96,52% dari target sebesar 98%, sehingga capaiannya sebesar 105. Dapat terlihat dalam tabel diatas bahwa terdapat penurunan capaian tingkat pemanfaatan TI setiap tahunnya. Penurunan ini dikarenakan berubahnya metode pengukuran pemanfaatan TI sejak tahun 2022, yaitu dengan mengukur keterlibatan pegawai secara lebih detail dalam memanfaatkan TI yang telah disediakan sebagai pendukung Tupoksi pegawai.

Berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023 yang telah disusun, BPK Jatim berupaya mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, himbauan update aplikasi SISDM maupun aplikasi lain seperti SIAP LK, SIAP Banparpol, Jasmin dan aplikasi pendukung lainnya.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 28 Perbandingan Realisasi IKU 9 pada BPK Jatim terhadap target

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	96,52	96.52%

Seperti di Tahun 2022, realisasi IKU 9 tingkat pemanfaatan teknologi dan Informasi tahun 2023 belum mencapai target. Keterlibatan seluruh pegawai didorong untuk mencapai IKU 9 di lingkungan BPK Jatim. Diharapkan capaian IKU 9 dapat terus meningkat dan optimal hingga tahun 2024.

Untuk melaksanakan IKU 9, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menganggarkan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp304,450,000,00 dengan realisasi 100%.

ANALISIS DAN EVALUASI

Sebagai upaya pemenuhan IKU 9, pimpinan telah mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, aplikasi pemeriksaan (SIAP LK, SiPTL), SISDM, Jasmin, serta wajib menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan. Dengan pemenuhan IKU 9 diharapkan pemanfaatan TI dan sarpras lebih optimal, Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras melalui penyediaan akses jaringan komputer kantor melalui VPN yang aman dan andal diharapkan dapat mendukung penerapan kebijakan bekerja dimanapun.

Pemanfaatan TI tahun 2023 di Jawa Timur tidak mencapai target. Berdasarkan hasil data pemanfaatan TI yang diterbitkan Biro TI, diperoleh penilaian sebagai berikut :

Tabel 29 Hasil Penilaian Pemanfaatan TI BPK Jatim Tahun 2020-2023

No	Indikator	Nilai			
		Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
	Skor Pemanfaatan TI	98,79%	98,79%	96,55%	96,52%
1	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM	95.14%	95.14%	99,49%	93.52%
2	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN	-	-	81,75%	87.87%
3	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP	100.00%	100.00%	100,00%	100.00%
4	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP	100.00%	100.00%	96,94%	98.47%
5	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL	100.00%	100.00%	100,00%	99.78%

Perubahan metode pengukuran pemanfaatan TI sejak tahun 2022, mengakibatkan keterlibatan pegawai diukur secara lebih detail dalam memanfaatkan TI baik itu dalam memanfaatkan SISDM, Jasmin, SMP, SiAP LK, maupun SiPTL.

Pemanfaatan aplikasi SISDM tidak mencapai 100% karena terdapat kendala dalam *update* data pegawai di sisdm yang meliputi informasi pegawai, pendidikan dinas, SPT, LHKPN dan tempat tinggal.

Untuk pemanfaatan aplikasi jasmin tidak maksimal karena para pegawai yang memanfaatkan jasmin tidak memberikan catatan selesai di jasmin walaupun proses persuratannya telah selesai.

Untuk pemanfaatan SiAP LK dan SiPTL, kendala *cutoff*, yaitu data TI ditarik Biro TI pada tanggal 20 Januari. Berdasarkan data pemanfaatan TI pada BIDICs, dapat diketahui bahwa dalam aplikasi Siap LK, masih terdapat dua pemeriksaan interim yang belum menyelesaikan validasi HP3 di tingkat Ketua Tim. Secara rinci angka persentase capaian TI juga tidak dapat diperoleh sehingga menyulitkan evaluasi. Setelah proses penyusunan laporan kinerja ini, akan dilanjutkan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengevaluasi ketidaktercapaian target IKU 9.

Berdasarkan hasil penilaian diatas, pemanfaatan TI di Perwakilan Jatim cukup memuaskan karena telah mencapai 90% lebih, namun tidak dapat mencapai 100% karena beberapa kendala teknis.

Di tahun mendatang berbagai kendala yang muncul di tahun tahun sebelumnya diusahakan dapat diminimalisir dengan lebih meningkatkan koordinasi semua pihak yang terlibat. Akan diintensifkan sosialisasi kepada pegawai terkait pemanfaatan SISDM, Jasmin, Aplikasi SIAP maupun SIPTL dan dilaksanakan komunikasi internal maupun dengan Biro TI untuk mengevaluasi penyebab tidak tercapainya pemanfaatan aplikasi sebesar 100%.

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan (IKU 10)

DEFINISI

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode- metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidi pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

METODE PENGUKURAN

IKU 10 diukur dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain tingkat penyusunan Best Practice (A), tingkat penerapan Best Practice (B), dan tingkat pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP) (C).

1. Poin A diukur dengan formula $A = (a/b) \times 100\%$
 - a. Jumlah usulan Best Practice yang disusun
 - b. Jumlah usulan Best Practice yang direncanakan untuk disusun
2. Poin B diukur dengan formula $B = (c/d) \times 100\%$
 - c. Jumlah Best Practice yang diterapkan
 - d. Jumlah Best Practice yang direncanakan untuk diterapkan
3. Poin C diukur dengan formula $C = (e/f) \times 100\%$
 - e. Jumlah usulan Best Practice yang disusun
 - f. Jumlah usulan Best Practice yang direncanakan untuk disusun

SUMBER DATA

Laporan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang mencakup:

1. Usulan Best Practice (ND Usulan BP, Usulan BP, ND Direktorat PSMK tentang Hasil Penilaian Usulan BP)

2. Laporan atas Penerapan Best Practice (ND Penyampaian Penerapan BP, Laporan Hasil Penerapan BP)
3. Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (ND Penyampaian Aktivitas MP, Laporan

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 10 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 30 Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2023

IKU. 10 <i>(Tingkat penerapan manajemen pengetahuan)</i>	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi *)	100.00%	100.00%	105.83%	103.33%	
Capaian	100.00	100.00	105.00	105.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	0.00	5.00	0.00	

Realisasi IKU tingkat penerapan manajemen pengetahuan tahun 2023 adalah sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Jatim dapat mempertahankan capaian IKU 10 dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023 BPK Jatim telah menyampaikan satu usulan Best Practice sesuai ND 367/ND/XVIII.SBY/11/2023 yaitu Portal Kelola Data, dan telah melaksanakan berbagai aktivitas Manajemen Pengetahuan yang telah dilaporkan kedalam Laporan Aktivitas Manajemen Pengetahuan BPK Jatim tahun 2023 kepada Kaditama Renvaja sesuai ND 27/ND/XVIII.SBY/01/2024.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi IKU 10 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	103,00%	103.33%

realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 103,33%.

ANALISIS DAN EVALUASI

BPK Jatim telah berkomitmen mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan antara lain berupa Komunitas Praktisi (*Community of Practice/CoP*) melalui Whatsapp Group TPP LKPD, *Coaching/Mentoring* (Habituaasi CPNS), *Peer Assist* sesuai tema pemeriksaan semester II, usulan *Best Practice* baru, dan Pelaporan pelaksanaan aktivitas manajemen.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK antara lain pemanfaatan portal intranet BPK untuk mengunggah usulan *best practice*. Manfaat yang diperoleh adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang serta kemudahan akses bagi satker yang akan mereplikasi *best practice*.

Peningkatan capaian akan semakin baik jika didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain.

1. Peningkatan pemahaman atas *knowledge management* dan *best practice*;
2. Sistem *rewarding* atas usulan *Best Practice* dari satker yang terpilih menjadi *Best Practice level* BPK Wide secara lebih memadai;
3. Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait *knowledge management* dan *best practice* yang melibatkan satker di lingkungan BPK;
4. Penentuan prioritas kegiatan terkait pembangunan portal *knowledge management* terutama dalam hal kebutuhan penyempurnaan pembangunan portal sebagai sarana/media *best practice sharing*;

Pengelola dan pihak-pihak terkait pelaksanaan IS *Best Practice Sharing* diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan *best practice* sesuai dengan Roadmap Implementasi Manajemen Pengetahuan BPK yang telah disusun, sehingga pelaksanaan *best practice* di BPK dapat terimplementasi secara menyeluruh.

Di Tahun mendatang, akan diupayakan komunikasi yang lebih intensif antara pimpinan di level manajemen untuk mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan, dan mensosialisasikan budaya pendokumentasian aktivitas Manajemen Pengetahuan di setiap unit kerja di Perwakilan Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan aktivitas Manajemen Pengetahuan.



Gambar Kegiatan Bantuan Rekan Sejawat Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (IKU 11)

DEFINISI

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran indeks ini didasarkan kepada hasil survey kepada stakeholder BPK Jatim. Adapun skala hasil survei yang digunakan yaitu :

- a. 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b. 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c. 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d. 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

SUMBER DATA

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 11 Tingkat Kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 32 Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2023

IKU. 11	Tahun				
<i>(Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
Realisasi *)	3.62	3.86	4.22	4.15	
Capaian	95.26	101.58	105.00	105.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	6.32	3.42	0.00	

Realisasi IKU Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi tahun 2023 adalah sebesar 4,15 dari target sebesar 3,80 sehingga capaiannya sebesar 105.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 33 Perbandingan Realisasi IKU 11 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	4,22	100%

realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi terhadap target Tahun 2024 telah dapat dicapai.

ANALISIS DAN EVALUASI

Ketercapaian target IKU 11 menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan puas dengan kualitas komunikasi melalui sarana-sarana komunikasi yang disediakan oleh yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terbukti juga dengan berhasilnya BPK Jatim mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani sebagai salah satu bentuk pengakuan atas

kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan pada tahun 2021. BPK Jatim telah berupaya meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, serta kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Salah satunya melalui kegiatan komunikasi *stake holder*.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam pengukuran indikator ini adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi digital. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak surveyor. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei realtime. Sedangkan manfaat bagi pihak surveyor berupa efisiensi tenaga surveyor, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei realtime.

Di tahun mendatang BPK Jatim akan tetap menjaga kualitas komunikasi dengan *stakeholder* melalui saluran-saluran komunikasi yang telah ada dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundangan dan akan terus menggali berbagai inovasi agar hasil survey Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi tetap mendapatkan nilai maksimal.

12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi (IKU 12)

DEFINISI

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru.

Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK

METODE PENGUKURAN

IKU 12 diukur melalui perbandingan Jumlah Pegawai yang telah memenuhi jam diklat (a) dibanding dengan jumlah seluruh pegawai (b) menggunakan formula $(a/b) \times 100\%$.

SUMBER DATA

1. Bedzetting Pegawai
2. SK Mutasi
3. Nota Dinas Penempatan
4. Sertifikat Pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh: Pusdiklat, Biro SDM, dan Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja;
5. Sertifikat KTF atau In House Training yang diadakan oleh Satuan Kerja dengan persetujuan Badiklat PKN

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 12 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 34 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2023

IKU. 12	Tahun				
<i>(Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	105.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	0.00	0.00	5.00	

Realisasi IKU 12 pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan skor 105. Dari 260 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, seluruhnya telah memenuhi jam diklat yang ditetapkan.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 35 Perbandingan Realisasi IKU 12 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

realisasi IKU 12 Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi terhadap target Tahun 2024 telah tercapai 100%.

ANALISIS DAN EVALUASI

indikator Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dapat tercapai karena berbagai langkah, diantara usulan pelaksanaan diklat untuk pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang, melaksanakan diklat di Perwakilan, melaksanakan in-house training untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai yang tidak dapat diakomodasi melalui diklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop. Sampai dengan 31 Desember 2023, target pemenuhan jam diklat pegawai telah tercapai 100% seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 36 Pencapaian Pemenuhan Jam Diklat Tahun 2023

IKU 12	Pemenuhan Jam diklat Pengembangan Kompetensi			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	60,23%	60,23%	76,15%	100%

Untuk melaksanakan IKU 12 pada tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp 257,785,000 dan terealisasi sebesar Rp 257,760,189,00 atau sebesar 99,99%.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK adalah melaksanakan diklat secara mandiri oleh masing-masing satuan kerja yang telah disetujui oleh Badan Diklat PKN. Manfaat penerapan diklat secara mandiri antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja barang.

Di tahun 2024, BPK Jatim merencanakan penyelenggaraan Diklat secara mandiri di Perwakilan bagi Pemeriksa maupun Pegawai Non Pemeriksa untuk memastikan pemenuhan Jam Diklat bagi seluruh pegawai.

13. Tingkat Kinerja Anggaran (IKU 13)

DEFINISI

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Target IKU 13 tahun 2021 ditetapkan sebesar 88%. Penetapan target sudah mempertimbangkan capaian tahun lalu dengan komposisi:

- a. $60\% \text{ EKA} = 60\% \times 83\%$ (target EKA Satker lain)
- b. $40\% \text{ EPA} = 40\% \times 95\%$ (rata2 capaian EPA satker tahun lalu)

TUJUAN

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

METODE PENGUKURAN

Kinerja anggaran di hitung berdasar Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) (a), dan nilai evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) (b), dengan formula $60\% \times a) + (40\% \times b)$

SUMBER DATA

Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran (Biro Keuangan)

REALISASI TAHUN 2023

Perkembangan capaian IKU 13 pada periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 37 Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2023

IKU. 13	Tahun				
(Tingkat kinerja anggaran)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	83.00%	84.00%	88.00%	84.50%	85.70%
Realisasi *)	91.77%	90.50%	89.16	88.65%	
Capaian	105	103.43	101.32	105.00	
Perubahan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	-	-1.27	-2.11	3.68	

Tingkat Kinerja Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah 88,65% dengan skor 105 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 88,5%. IKU 12 terdiri dari pencapaian sub IKU 13.1 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 85,37%, dan sub IKU 13.2 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 93,56%.

Sementara itu perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 38 Perbandingan Realisasi IKU 13 pada BPK Jatim terhadap target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap target Tahun 2024
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	83%	84%	84%	84,5%	85,7%	88,65%	103,44%

realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun telah mencapai target tahun 2023. Dalam mencapai IKU 13, seluruh komponen di BPK Jatim berkomitmen bersama, mulai dari pimpinan hingga pelaksana pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berusaha memenuhi jadwal dan realisasi Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan. Selain itu, kerja sama yang erat antara BPK Perwakilan Jawa Timur dengan mitra kerja seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) jugabturut mendukung proses pelaksanaan anggaran dengan baik dan memudahkan koordinasi dalam revisi bilamana diperlukan. Diharapkan capaian ini akan dapat dipertahankan hingga akhir periode renstra 2024.

ANALISIS DAN EVALUASI

Tercapainya indikator 13 diantaranya karena penyusunan dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran tepat waktu; penyusunan data capaian output; melakukan pembahasan pagu indikatif, menyusun Laporan Keuangan s.d, menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran, menyusun data capaian output, dan melakukan sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun, upaya pemenuhan rencana penarikan dana, serta hubungan kerjasama dengan mitra kerja yang terjalin baik cukup mendukung pencapaian IKU 13. Selama Tahun 2023 tren pencapaian kinerja anggaran BPK Jatim (IKU 13) positif seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 39 Pencapaian Kinerja Anggaran Tw I s.d IV 2023

IKU 13	Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2023			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	69,45%	79,66%	84,10%	88,65%

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran yang berkontribusi terhadap kinerja anggaran, dan melakukan penajaman kegiatan yang menjadi prioritas, efisiensi dan optimalisasi terhadap pagu anggaran yang ada pada DIPA/POK.

Di Tahun mendatang akan diteruskan upaya peningkatan capaian IKU 13 melalui penyusunan dokumen penganggaran dan pemantauan pelaksanaan realisasi anggaran secara periodik, penyusunan data capaian output, dan sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun untuk mengoptimalkan kinerja anggaran Perwakilan, dan menjalin kerjasama dengan lebih baik dengan mitra kerja seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Jawa Timur telah mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber-sumber pendanaan BPK dikelola melalui program penganggaran yang diselaraskan dengan implementasi perencanaan strategis yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya.

Pada Tahun 2023, capaian kinerja BPK Jawa Timur didukung dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran. Berdasarkan RKP Tahun 2023, yang mendukung sasaran meningkatnya pemeriksaan berkualitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp31.221.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.201.586.797,00 atau sebesar 99,94% yang terdiri dari :

1. Keluaran LHP yang meliputi pelaksanaan pemeriksaan interim/pendahuluan, pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD, kinerja dan PDDT, dan pemeriksaan Banparpol.
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
3. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
4. Bahan Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan
5. Sumbangan IHPS Perwakilan
6. Laporan Profil Entitas
7. Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan, dan
8. Layanan Manajemen Internal Perwakilan

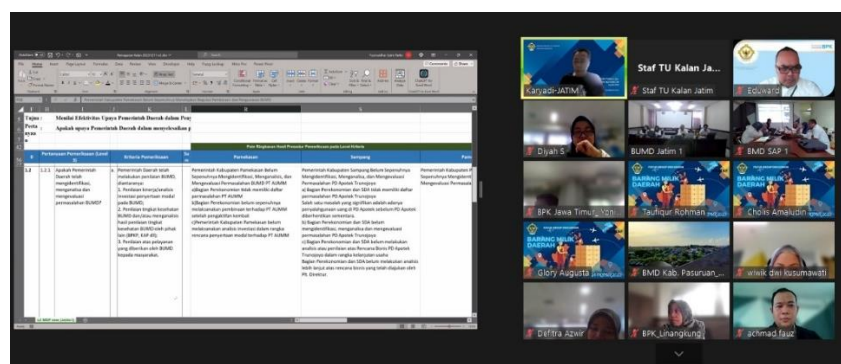
Sedangkan RKSP Tahun 2023 yang mendukung sasaran meningkatnya layanan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp26.983.319.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp26.886.090.655,00 atau sebesar 99,64%, yang terbagi menjadi :

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal, dan
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

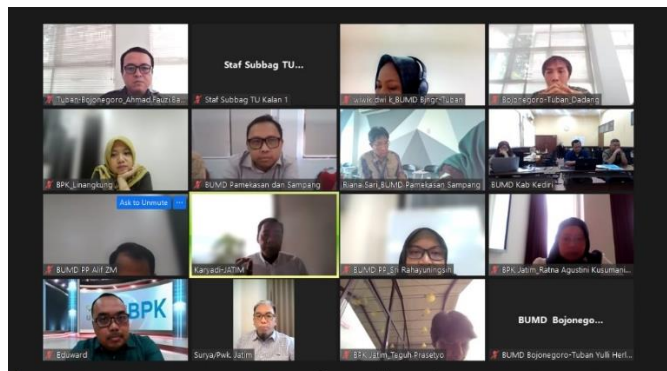
Dalam rangka mencapai Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, dan juga efisiensi anggaran dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi

Penggunaan media zoom untuk pengarah dan rapat sehingga dapat mengefektifkan waktu



Gambar 10 Pemantauan Perkembangan Pemeriksaan Kinerja BUMD 11 Des 2023 oleh Kepala Perwakilan



Gambar 11Rapat pembahasan pemeriksaan BUMD 23 Nov 2023

2. Pengelolaan BMN

Pelaksanaan penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi diperlukan untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Pada Tahun 2023, BPK Jatim telah melaksanakan pemusnahan satu asset tak berwujud berupa software dan juga peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat. Selain itu dilaksanakan pula pemusnahan arsip inaktif yang telah memenuhi umur. Pada Tahun 2023, Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemusnahan arsip sebanyak 668 boks arsip sebagai upaya efisiensi dan efektivitas kerja, serta penyelamatan informasi arsip itu sendiri dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya..

3. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (output) Program atau capaian Keluaran (output) Kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (output) Program atau capaian Keluaran (output) Kegiatan. Terdapat faktor penghambat dengan metode pengukuran atas variabel kinerja efisiensi dengan variabel penyerapan anggaran pada aspek implementasi bertolak belakang, karena untuk mencapai nilai efisiensi yang tinggi, maka tingkat penyerapan anggaran harus kurang dari 100%. Kondisi saat ini, seluruh perencanaan kegiatan di BPK Jatim telah disusun secara akurat, sehingga penyerapan anggaran akan mendekati angka maksimal 100%.

D. Budaya Kerja

Sebagai upaya Perwakilan Jawa Timur menyamakan kebiasaan dan pola pikir seluruh individu pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah dikembangkan Budaya Kerja "BPK Jatim" untuk dapat mendukung peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur secara berkesinambungan. Selain itu budaya kerja diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi BPK 2020-2024. Budaya kerja "BPK Jatim" meliputi:

- B** do the **B**est
melakukan yang terbaik sebagai wujud ibadah yang sejati
- P** **disiP**line
disiplin dalam manajemen waktu
- K** **work** smart
bekerja cerdas dengan mengoptimalkan sumber daya dan fasilitas yang ada
- J** **enJ**oy
menikmati setiap pelaksanaan tugas dan hal tersebut dimulai dari rumah, dari keluarga
- A** **teA**mwork
selalu mengedepankan kerja sama tim dalam bekerja, kompak, dan bersinergi
- T** **respec**T
saling menghargai antar pegawai, tanpa merasa lebih baik dari yang lain, saling melengkapi atas kelemahan yang ada, dan melihat segala sesuatu secara positif
- I** Never **G**ive Up
tidak menyerah dalam upaya mencapai tujuan, jika mengalami kesulitan, ambil jeda untuk kembali berdaya tahan dan bangkit dengan melakukan inovasi baru secara optimal
- M** Stay **H**umble
bersikap rendah hati kepada siapapun, sesama pegawai, kepada atasan/bawahan, keluarga, audiens dan siapapun yang ditemui

Dengan penetapan budaya kerja tersebut, setiap pegawai diharapkan dapat menjadikannya pedoman dan kebiasaan sejalan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan BPK Jatim.

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp58.087.677.452,00(99,80%) dari pagu Rp58.204.599.000,00. Penyerapan anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sangat tinggi dan tidak terdapat kendala yang berarti. Dalam pelaksanaan kegiatannya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Prosedur Operasional Standar (POS) Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran, Tata Cara Revisi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK

F. Inovasi

BPK Jatim memiliki bank inovasi yang berisi berbagai inovasi yang dikumpulkan dari seluruh pegawai dan berbentuk *booklet inovasi*. Sampai dengan Tahun 2023 telah terdapat dua inovasi BPK Jatim yang didaftarkan sebagai *Best Practice* dan terpilih sebagai *Best Practice* yang dapat direplikasi, yaitu SIYANDRA dan Aplikasi Surat Tugas. Pada tahun 2023 BPK Jatim mengusulkan Best Practice Portal Kelola Data Portal Kelola yang merupakan media berbagi data (*file sharing*) atau memberikan akses data yang ada di dalam *server* Portal BPK bagi para pegawai yang bertujuan untuk sentralisasi data yang dapat diakses *anytime anywhere* untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas. BPK RI telah menyediakan Portal Kolaborasi (<http://portal.bpk.go.id>) yang dapat dimanfaatkan dalam penyimpanan dokumen pemeriksaan dan non-pemeriksaan. Portal memiliki fitur kolaborasi antar pegawai BPK serta memiliki standar keamanan yang baik didukung dengan teknologi terkini yang dimiliki oleh BPK RI, dimana fungsi penggunaan Portal Kelola Data adalah Pemusatan data, Mudah, Penemuan kembali arsip yang cepat, Monitoring dan Kolaborasi data.

G. Penghargaan

Pada Tahun 2023 terdapat beberapa penghargaan yang berhasil diterima BPK Jawa Timur, diantaranya :

1. SIDO APIK_Satker Mitra Bank BNI Wilayah KPPN Sidoarjo;
2. Sertifikat Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; dan
3. Terbaik III Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian (SDM Award)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Auditorat Keuangan Negara V BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian target kinerja dalam mendukung visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024. Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 adalah sebesar **100,25%**, sedangkan pencapaian skor IKU BPK Jawa Timur selama periode renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Nilai IKU tahunan

Skor 2020	Skor 2021	Skor 2022	Skor 2023
99,94	100,09	100,15	100,25

Pencapaian skor IKU BPK Jatim pada Periode Renstra 2020-2024 meningkat setiap tahun. Komitmen Kepala Perwakilan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja hingga turunannya kedalam Indikator Kinerja Individu setiap Pegawai tergambar dalam pencapaian ini. Dukungan seluruh pegawai mempunyai andil dalam mewujudkan pencapaian yang tidak mudah ini.

Pemenuhan IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan), IKU 3 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan), IKU 4 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional), IKU 5 (Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan), IKU 6 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal), IKU 8 (Hasil Evaluasi AKIP), IKU 10 (Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan), IKU 11 (Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi), IKU 12 (Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi) dan IKU 13 (Tingkat Kinerja Anggaran) akan dipertahankan dan diusahakan meningkat di tahun depan.

Untuk IKU yang belum dapat mencapai target tahun 2023 yang terdiri dari :

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar; dan
3. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Akan diupayakan bersama perbaikan rencana pencapaiannya.

Adapun Strategi Pemecahan Masalah Serta Rencana Aksi Pemenuhan Target-target yang tidak tercapai di tahun 2023 antara lain :

1. Upaya pemenuhan target Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dilakukan dengan mendorong perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), serta meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, selain itu di tahun 2024 akan semakin diefektifkan reviu silang antar tim pemeriksa dan antar unit kerja pemeriksa untuk mengurangi kesalahan akurasi angka, konsistensi dan kesalahan lainnya. Anggota tim, ketua tim, dan pengendali teknis didorong untuk lebih aktif dan berbagi tugas melakukan cek list atas LHP agar tidak ditemukan lagi kesalahan saat evaluasi LHP oleh EPP.
2. Upaya pemenuhan indikator Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. BPK Jatim berupaya meningkatkan capaian itu tersebut antara dengan :
 - a. Membangun sistem untuk memonitor benturan kepentingan dalam penugasan pemeriksaan
 - b. Mengagendakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja BPK Jatim
 - c. Memastikan seluruh Tim Pemeriksa terinci LKPD menandatangani pakta IntegritasPada Tahun 2024, sosialisasi/internalisasi nilai-nilai dasar kepada seluruh pegawai diupayakan lebih maksimal ditambah dengan simulasi bersama pengisian survei indeks nilai dasar di setiap unit kerja di lingkungan kantor BPK Jatim.
3. Upaya pemenuhan indikator Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan dengan mendorong memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan dalam melaksanakan tupoksi kepada seluruh pegawai, memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan (SIAP LK, SIAP Banparpol) serta wajib menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan. Dengan pemenuhan IKU 9 diharapkan pemanfaatan TI melalui penyediaan akses jaringan komputer kantor melalui VPN yang aman dan andal yang dapat mendukung penerapan kebijakan bekerja dimanapun dapat lebih optimal. Tahun 2024 akan diintensifkan sosialisasi kepada pegawai terkait pemanfaatan SISDM, Jasmin, Aplikasi SIAP maupun SIPTL agar memaksimalkan dukungan pegawai dalam pencapaian IKU 9 dan melanjutkan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penilaian pemanfaatan TI di Perwakilan Jawa Timur.

Semoga kedepan, indikator kinerja yang belum maksimal dapat tercapai dengan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan dan kami berharap penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan baik untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK maupun untuk para pemegang kepentingan di luar BPK lainnya.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
TAHUN 2023**

Unit/Satuan Kerja : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tahun : 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) - Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I - Pengarahan Kepala Perwakilan kepada Tim Pemeriksa LKPD - ND arahan untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi penyusunan LHP Triwulan II: - Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pemeriksaan Terinci LKPD atas 39 entitas - Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tingkatan eksternal melalui hasil evaluasi Triwulan III: - Merencanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) - Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan serta grup untuk saling koordinasi untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT Triwulan IV: - Pemenuhan QA QC 7 Tim Pemeriksaan Kinerja dan 3 Tim Pemeriksaan DTT Non Banpol - Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tingkatan eksternal melalui hasil evaluasi EPP
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	100%	100%	Desember	Triwulan I: - Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan memastikan tercapainya simpulan LHP di Perwakilan Jawa Timur sesuai harapan penugasan yang telah ditetapkan dalam P2; Triwulan II: - Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan III: Reviu berjenjang Penyusunan P2 LHP Kinerja dan PDTT
								Triwulan IV: Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDTT dengan simpulan yang telah sesuai dengan P2
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL • Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).
								Triwulan II: • Input data PTL kedalam aplikasi SMP dan mendorong pemda melakukan input data TL melalui SIPTL • Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas untuk mempercepat pelaksanaan TL dengan melaksanakan pembahasan dan verifikasi dokumen TLRHP • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL • Pemantauan persentase TL melalui SMP dan SIPTL
								Triwulan III: • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL • Evaluasi Pemanfaatan SMP dan SIPTL untuk mengoptimalkan pemantauan tindak lanjut di internal BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								- Pemantauan persentase TL melalui SMP dan SIPTL Triwulan IV: - Input data PTL kedalam aplikasi SMP dan SIPTL - Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II dengan mengundang entitas untuk mempercepat pelaksanaan TL melalui SIPTL dan melaksanakan pembahasan TLRHP - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Pemantauan persentase TL melalui SMP dan SIPTL
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I : Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional
								Triwulan II: Mengawal anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional
								Triwulan III: Mengawal anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional
								Triwulan IV: Pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: - Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan melakukan perencanaan anggaran sesuai prosedur jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan - Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan
								Triwulan II: Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan melakukan perencanaan anggaran sesuai prosedur jika

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan
								Triwulan III: • Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan melakukan perencanaan anggaran sesuai prosedur jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Segera merespon permintaan pemeriksaan dengan mengalokasikan tenaga pemeriksa sesuai prosedur untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan
								Triwulan IV: • Pelaksanaan Pemeriksaan on call
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I: • Memastikan alokasi anggaran pemeriksaan 2021 untuk pemeriksaan tematik lokal Triwulan II: • Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal • Mengawal anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal Triwulan III: • Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal • Mengawal anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: Pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I - Melaksanakan monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD. - Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP - Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja
								Triwulan II - Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD - Penempatan banner terkait visi misi dan nilai dasar BPK di lingkungan kantor BPK Jatim
								Triwulan III Penempatan banner dan sarana informasi lain terkait visi misi dan nilai dasar BPK di lingkungan kantor BPK Jatim
								Triwulan IV - Penempatan banner terkait visi misi dan nilai dasar BPK di lingkungan kantor BPK Jatim - Sosialisasi kepada pegawai untuk Memaksimalkan pengisian kuisisioner implementasi nilai dasar
IKU 8	Hasil Evaluasi	A (89,00)	-	-	-	A (89,00)	Desember	Triwulan I Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	AKIP							Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada peraturan yang berlaku Menindaklanjuti rekomendasi Itama dalam evaluasi AKIP Triwulan II Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja mengacu keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya Triwulan III Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja mengacu keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya Triwulan IV Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan IV 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja mengacu keputusan Sekjen dan ketentuan terkait lainnya
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	98%	98%	98%	98%	Desember	Triwulan I Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan layanan aplikasi jasmin, memutakhirkan data SISDM dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol)

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan
								Triwulan II. Pelaksanaan pemanfaatan layanan TI
								Triwulan III Monitoring pemanfaatan layanan TI oleh subbagian Umum dan TI
								Triwulan IV Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan layanan TI di Perwakilan
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	12,5%	25%	37,5%	100%	Desember	Triwulan I - Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2022 - Inventarisir usulan Best Practice untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan - Bantuan rekan sejawat, berupa pembahasan P2 terinci dan strategi pemeriksaan terinci LKPD oleh TPP LKPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. - Melaksanakan Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2022 - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan – Komunitas Praktisi (Community of Practice/CoP) melalui WhatsApp Group TPP LKPD. - Reviu pasca aktivitas, berupa konsep LHP dan opini LKPD Pemerintah Kota Madiun oleh Tim Reviu Opini atas LKPD TA 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
								Triwulan II - Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2022 - Inventarisir usulan Best Practice untuk Tahun 2023 di lingkungan Perwakilan - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan – Komunitas Praktisi (Community of Practice/CoP) melalui WhatsApp Group TPP LKPD.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								- Reviu pasca aktivitas, berupa konsep LHP dan opini LKPD oleh Tim Reviu Opini atas LKPD TA 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Triwulan III - Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2022 - Inventarisir usulan Best Practice di Perwakilan - Melaksanakan evaluasi kegiatan atas hasil Evaluasi atas Penyusunan LHP oleh EPP untuk meminimalkan tingkat kesalahan dalam penyusunan LHP. - Forum berbagi pengetahuan oleh pemeriksa berdasarkan diklat yang telah diikuti. - Bantuan rekan sejawat, berupa pembahasan P2 sesuai tema pemeriksaan semester II Triwulan IV - Melaksanakan evaluasi kegiatan, berupa pembahasan untuk mengevaluasi pencapaian target IKU atas persentase penyelesaian TLHP. - Bantuan rekan sejawat, berupa pembahasan LHP sesuai tema pemeriksaan semester II. - Mengusulkan Replikasi/ Best Practice Baru untuk tahun 2023 - Pelaporan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan tahun 2023
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan I: Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit Triwulan II: Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
																meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit Triwulan III: Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit Triwulan IV: Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	10%	15%	30%	40%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	90%	100%	Desember	Januari : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan diklat persiapan LKPD di Perwakilan Jawa Timur Februari : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Februari bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja										Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I		TW II		TW III		TW IV					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		
												dan 20 JP bagi penunjang Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop		
												Maret : Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Maret bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop		
												April : Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan April bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop		
												Mei : Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Mei bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop		
												Juni :		

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja										Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I		TW II		TW III		TW IV					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		
												• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Juni bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang • Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop		
												Juli : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Juli bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang • Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop		
												Agustus : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Agustus bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang • Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop		
												September : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan September bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang • Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan		

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja										Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP		
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
															in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop • Mengajukan proposal permohonan diklat teknis bagi pegawai. • Menyusun Usulan Penyetaraan Jam Diklat Pegawai atas Pelatihan/Workshop yang diselenggarakan oleh lembaga di luar BPK Oktober : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Oktober bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang • Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop • Menyelenggarakan diklat di Perwakilan untuk mengakomodir pemenuhan jam diklat pegawai. • Menyusun Usulan Penyetaraan Jam Diklat Pegawai atas Pelatihan/Workshop yang diselenggarakan oleh lembaga di luar BPK November : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Oktober bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang • Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop • Menyusun Usulan Penyetaraan Jam Diklat Pegawai atas Pelatihan/Workshop yang diselenggarakan oleh lembaga di luar BPK	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
															Desember : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk bulan Desember bagi pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; • Monitoring JP Diklat Pegawai, yaitu 40 JP bagi pemeriksa dan 20 JP bagi penunjang • Menginventarisir topik-topik in-house training yang relevan dengan kebutuhan pegawai dan mengajukan pelaksanaan in-house training kepada Badiklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop • Melaksanakan in-house training untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai yang tidak dapat diakomodasi melalui diklat dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan workshop. • Menyusun Usulan Penyetaraan Jam Diklat Pegawai atas Pelatihan/Workshop yang diselenggarakan oleh lembaga di luar BPK	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%			88%			88%			88%			Desember	Triwulan I: • Menyusun laporan bulanan satker • Melaksanakan rapat koordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran TA 2022 • Melaksanakan pemutakhiran RPD pada hal III DIPA • Menyusun data capaian output.
																Triwulan II: • Menyusun laporan bulanan satker • Melaksanakan pemutakhiran RPD pada hal III DIPA • Menyusun data capaian output; • Pembahasan pagu indikatif.
																Triwulan III: • Menyusun laporan bulanan satker • Menyusun Laporan Keuangan Semesteran Perwakilan; • Menyusun data Capaian output; • Pembahasan pagu anggaran.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: • Menyusun laporan bulanan satker • Menyusun Laporan Keuangan Tw III • Menyusun data capaian output • Finalisasi pagu alokasi dan pengumuman SIRUP • Sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun.

SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama		Tahun 2023		Skor
		Target	Realisasi	
1		2	3	4 =(3/2*100)
SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR				100,25
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100.00%	87.69%	87.69
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100.00%	100.00%	100.00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75.00%	91.74%	105.00
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100.00%	101.74%	101.74
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100.00%	101.00%	101.00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100.00%	100.00%	100.00
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.00	4.62	92.40
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89.00	91.40	102.70
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98.00%	96.52%	98.49
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100.00%	103.33%	103.33
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3.80	4.15	105.00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100.00%	100.00%	100.00
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88.50%	88.65%	100.16

Perbandingan Capaian Kinerja 4 Tahun Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Skor	Target	Realisasi	Skor	Target	Realisasi	Skor	Target	Realisasi	Skor
1		2	3	4 =(3/2*100)	5	6	7 =(6/5*100)	8	9	10 =(9/8*100)	11	12	13=(9/8*100)
SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR				99.94			100.04			100.15			100.25
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100.00%	84.38%	84.38	100.00%	89.25%	89.25	100.00%	82.75%	82.75	100.00%	87.69%	87.69
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100.00%	100.00%	100	100.00%	100.00%	100	100.00%	100.00%	100.00	100.00%	100.00%	100.00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75.00%	86.95%	105	75.00%	86.05%	105	75.00%	88.88%	105.00	75.00%	91.74%	105.00
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100.00%	101.10%	100	100.00%	100.44%	100.44	100.00%	101.11%	101.11	100.00%	101.74%	101.74
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100.00%	100.00%	100	100.00%	100.95%	100.95	100.00%	100.14%	100.14	100.00%	101.00%	101.00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100.00%	100.00%	100	100.00%	100.82%	100.82	100.00%	102.38%	102.38	100.00%	100.00%	100.00
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	500.00%	461.00%	92.2	500.00%	439.00%	87.8	500.00%	470.00%	94.00	500.00%	462.00%	92.40
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	8600.00%	8890.00%	103.37	8600.00%	8843.00%	101.64	8800.00%	8779.00%	99.76	8900.00%	9140.00%	102.70

Indikator Kinerja Utama		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Skor	Target	Realisasi	Skor	Target	Realisasi	Skor	Target	Realisasi	Skor
1		2	3	4 =(3/2*100)	5	6	7 =(6/5*100)	8	9	10 =(9/8*100)	11	12	13=(9/8*100)
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95.00%	98.79%	103.99	96.00%	98.79%	102.91	97.00%	96.55%	99.53	98.00%	96.52%	98.49
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100.00%	125.00%	105	100.00%	100.00%	100	100.00%	105.83%	105.00	100.00%	103.33%	103.33
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	380.00%	362.00%	95.26	380.00%	386.00%	101.58	380.00%	422.00%	105.00	380.00%	415.00%	105.00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100.00%	100.00%	100	100.00%	100.00%	100	100.00%	100.00%	100.00	100.00%	100.00%	100.00
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87.00%	91.77%	105	87.50%	90.50%	103.43	88.00%	89.16%	101.32	88.50%	88.65%	100.16

Target Kinerja 5 Tahunan Periode Renstra 2020-2025

Indikator Kinerja Utama		2020	2021	2022	2023	2024
IKU 1	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
IKU 4	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 7	Indeks implementasi Nilai Dasar BPK	5	5	5	5	5
IKU 8	Hasil evaluasi AKIP	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	A (90,05)
IKU 9	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi	95%	96%	97%	98%	100%
IKU 10	Tingkat penerapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 11	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
IKU 12	Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat kinerja anggaran	83%	84%	84%	84,5%	85,7%

**Perbandingan capaian tahun 2023 terhadap proyeksi tahun 2024
dalam Renstra BPK 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Utama		Tahun Kinerja 5 Tahunan					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 20223	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	IKU 1	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	88%	87.69	87.69%
2	IKU 2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00%
3	IKU 3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	92%	105.00	122.33%
4	IKU 4	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	100%	100%	100%	100%	100%	102%	101.74	101.74%
5	IKU 5	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101.00	101.00%
6	IKU 6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00%
7	IKU 7	Indeks implementasi Nilai Dasar BPK	5	5	5	5	5	4.62	92.40	92.40%
8	IKU 8	Hasil evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	AA	AA	AA
			86	87	88	89	90,05	91.4	105.00	101.50%
9	IKU 9	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi	95%	96%	97%	98%	100%	97%	98,49	96.52%
10	IKU 10	Tingkat penerapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	103%	105.00	103.33%
11	IKU 11	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4.15	105.00	98.81%
12	IKU 12	Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105.00	100.00%
13	IKU 13	Tingkat kinerja anggaran	83%	84%	84%	84,50%	85,70%	88.65%	105.00	103.44%